



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 911/ 31 / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf (a), agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan kepala dinas;
 - c. bahwa, nama nama tersebut dalam lampiran dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang RI No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;

6. Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Np. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
20. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.3/695/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrator kedalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
21. DPA Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor : 00353/DPA/2023 Tanggal 30 Desember 2022.
22. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.3/54, Tanggal 10 Januari 2022, perihal tindak lanjut penyetaraan Jabatan Fungsional.
23. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tengah nomor 821.2/250/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

24. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 911/ 004/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :
- a. Koordinator Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - b. Penyusun Laporan Keuangan;
 - c. Pengurus Barang / Pembantu Pengurus Barang;
 - d. Verifikator
 - e. Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerima.
- KETIGA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas dan wewenang:
1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 2. Menyiapkan SPM;
 3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD termasuk akuntansi aset; dan
 5. Menyusun laporan keuangan SKPD.
- KEEMPAT** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas:
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 2. Menyiapkan dokumen anggaran dan beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
 3. Membantu PPKom dalam menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
 4. Menandatangani bukti pengeluaran belanja atas nama PA/KPA berdasarkan kewenangan yang diberikan PA/KPA;
 5. Mempertanggungjawabkan kepada Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah uang muka kerja / panjar diterima; dan

- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 PA/KPA.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEMARANG.
PADA TANGGAL : 2 Januari 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Pengguna Anggaran



TEMBUSAN :

- Gubernur Jawa Tengah ;
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
- Inspektur Provinsi Jawa Tengah ;
- Kepala Biro Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah ;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Prov. Jateng ;
- Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) ;
- Sekretaris Dinas PUSDATARU Prov. Jateng ;
- Pejabat Penatausahaan Keuangan yang bersangkutan ;
- Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PUSDATARU Prov. Jateng ;
- Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PUSDATARU Prov. Jateng.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA
AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 911 / 31 / 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023**

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama dan NIP	Selaku	Program/Kegiatan
1	2	3	4
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD			
1	SUDARYADI, SH, MH NIP. 19650512 199009 1 001	Koordinator Pejabat Penatausahaan Keuangan	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
2	HENRI SHOFA, SSTP. M.Si NIP. 19770207 199703 1 005	Penyusun Laporan	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
3	SUGENG ADI NUGROHO, SE, MT NIP.19690111 199003 1 005	Verifikator	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
4	RUSMIYATI, SE NIP.197508212009111001	Penyusun Laporan	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
5	GHILBA DZIBA BOURGUIBA, A.Md. Ak NIP. 19990321 202201 2 004	Verifikator	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
6	ANDY RADITYO KRIDA SUSILO, ST NIP. 19800914 201101 1 006	Verifikator	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
7	VERA HARI DHAMAYANTI, ST, M.Sc NIP. 19770922 201001 2 007	Verifikator	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto

No	Nama dan NIP	Selaku	Program/Kegiatan
1	2	3	4
8	IMAM SUYUTI ABDUL KARIM,ST NIP. 19820410201101 1 010	Verifikator	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana
9	AGUNG WIDAYAT, ST NIP. 19760430 201012 1 001	Verifikator	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo
10	AGUSTINUS CITRA SANDI PURNAMA,ST NIP. 19750822 201001 1 014	Verifikator	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
11	PENI SADYASTUTI, SE NIP. 19670704199203 2 010	Verifikator	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy
12	ANDI HAMUDI NIP. 19770605 200911 1 001	Pengurus Barang	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
13	WAHYU PRAWESTI, A.Md. NIP. 19980220 202012 2 007	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
14	ALIMIN NIP. 19691127 200701 1 014	Pengurus Barang Pembantu	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
15	SUMARNO NIP. 19670415 198809 1 001	Pengurus Barang Pembantu	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto
16	SUNARTO NIP. 19741217 200604 1 017	Pengurus Barang Pembantu	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana
17	AGUS SULISTYO SRI NUGROHO NIP. 19710804 200604 1 010	Pengurus Barang Pembantu	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo

No	Nama dan NIP	Selaku	Program/Kegiatan
1	2	3	4
18	PONO NIP. 19690216 200701 1 002	Pengurus Barang Pembantu	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
19	RULLY MATFURUDDIN NIP. 19840611 201212 1 003	Pengurus Barang Pembantu	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy
20	ASHARI NIP. 19690323 199110 1 0001	Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Pembantu Bendahara Penerimaan	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
21	ISWANDARI, SE NIP. 19691018 199101 2 001	Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Pembantu Bendahara Penerimaan	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
22	FRANSISKA NITA WAHYU OKTAVIANI, A.Md. Ak NIP. 19991004 202201 2 001	Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Pembantu Bendahara Penerimaan	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

Semarang, 2 Januari 2023
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
 PROVINSI JAWA TENGAH



**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA
AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 911 / 31 / 2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023**

**DAFTAR :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWATENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama, NIP dan Jabatan	Selaku	Nomor DPA	Program/Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)			SEKRETARIAT	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	SETIYATI NURUL HIDAYAH, S.Sos, M.Si NIP. 19670204 199010 2 001 Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	00354/ DPA/2023	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			00355/ DPA/2023	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			00356/ DPA/2023	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			00357/ DPA/2023	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			00358/ DPA/2023	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	
			00359/ DPA/2023	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			00360/ DPA/2023	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00361/ DPA/2023	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN TEKNIS	
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
2	HENDRA AGUSTIAN, ST NIP. 19830801 200903 1 002 Teknik Pengairan Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	00362/ DPA/2023	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			00363/ DPA/2023	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU	
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
3	SISWO SUBAGYO, ST, MT NIP. 19670817 198809 1 002 Teknik Pengairan Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	00364/ DPA/2023	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			00365/ DPA/2023	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI	
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
4	NUR HIDAYAT, ST NIP. 19761026 200501 1 008 Teknik Pengairan Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	00366/ DPA/2023	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

No	Nama, NIP dan Jabatan	Selaku	Nomor DPA	Program/Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				BIDANG PENATAAN RUANG	
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
5	HARI ADI AGUS SETYAWAN, ST,MT NIP. 19800817 200501 1 012 Penataan Ruang Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	00367/ DPA/2023	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	
			00368/ DPA/2023	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	
			00369/ DPA/2023	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	
			00370/ DPA/2023	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Daerah Provinsi	
				BALAI PEMALI COMAL	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
6	YUDI ISKANDAR, ST. M.PSDA NIP. 19830227 201001 1 015 Teknik Pengairan Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	00371/ DPA/2023	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			00372/ DPA/2023	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00373/ DPA/2023	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00374/ DPA/2023	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
			00375/ DPA/2023	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Daerah Irigasi yang luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
			00376/ DPA/2023	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	
				BALAI BODRI KUTO	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
7	SYAM SAHIDA ALI MUSTOFA, ST, MT NIP. 19691109 199803 1 002 Teknik Pengairan Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	00377/ DPA/2023	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			00378/ DPA/2023	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00379/ DPA/2023	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00380/ DPA/2023	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
			00381/ DPA/2023	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Daerah Irigasi yang luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
			00382/ DPA/2023	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	
				BALAI SERANG LUSI JUANA (SELUNA)	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
8	MUHAMAD NURHADI, SST. MT NIP. 19670503 199603 1 001 Teknik Pengairan Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	00383/ DPA/2023	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			00384/ DPA/2023	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No	Nama, NIP dan Jabatan	Selaku	Nomor DPA	Program/Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			00385/ DPA/2023	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00386/ DPA/2023	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
			00387/ DPA/2023	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Daerah Irigasi yang luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
			00388/ DPA/2023	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Provinsi	
				BALAI BENGAWAN SOLO	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
9	SUPARNO, ST. M.Eng NIP. 19651110 198809 1 001 Teknik Pengairan Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	00389/ DPA/2023	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			00390/ DPA/2023	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00391/ DPA/2023	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00392/ DPA/2023	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
			00393/ DPA/2023	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Daerah Irigasi yang luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
			00394/ DPA/2023	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Provinsi	
				BALAI PROGO BOGOWONTO LUK ULO (PROBOLO)	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
10	FREDI NURCAHYA, ST. NIP. 19810309 200903 1 004 Teknik Pengairan Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	00395/ DPA/2023	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			00396/ DPA/2023	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00397/ DPA/2023	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00398/ DPA/2023	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
			00399/ DPA/2023	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Daerah Irigasi yang luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
			00400/ DPA/2023	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Provinsi	

No	Nama, NIP dan Jabatan	Selaku	Nomor DPA	Program/Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				BALAI SERAYU CITANDUY (SERCIT)	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
11	BAMBANG EKO JATMOKO, ST, MT NIP. 19740218 200701 1 006 Teknik Pengairan Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	00401/ DPA/2023	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			00402/ DPA/2023	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00403/ DPA/2023	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00404/ DPA/2023	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
			00405/ DPA/2023	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah irigasi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
			00406/ DPA/2023	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Provinsi	

Semarang, 2 Januari 2023
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

